

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberative Democracy in Bojonegoro Regency

Galang Gerald

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Alamat Email: galanggerald88@gmail.com

Abstract

The complexity of socio-economic issues had triggered a revolution for political openness and deliberation in Bojonegoro. Sobo Pendopo Dialogue, an open house event initiated by Kang Yoto-Kang Hartono since their election in 2008, brought about a revolution on the practice of political openness. The local government's ability to carry out this event for eight consecutive years gained global recognition through Open Government Partnership 2016. Sobo Pendopo Dialogue, in the context of liberal and substantial democracy, has disproved the liberal assumptions that economic and social capitals are prerequisite of democracy. From this point, Sobo Pendopo Dialogue will be analyzed by exploring the theories of deliberative democracy. The concept of political participation, public sphere and civil society are used to analyze the context of deliberative democracy found in Sobo Pendopo Dialogue. The research applies qualitative method with grounded theory type. Sobo Pendopo Dialogue has improved the development of local democracy. The researcher believes that public sphere can transform into a public institution, where people's political can be transformed legitimacy becomes the fundamental base in strengthening the role of civil society.

Keyword: Sobo Pendopo Dialogue, Deliberative, Democracy and Bojonegoro Regency

Intisari

Latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak ketepilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui Open Government Partnership 2016. Dialog Sobo Pendopo, secara dialektika wacana demokrasi liberal dan substansial, mematahkan asumsi-asumsi liberal yang menyertakan modal ekonomi dan sosial sebagai prasyarat menuju hakikat demokrasi. Berangkat dari hal tersebut, Dialog Sobo Pendopo di analisa melalui eksplorasi teori demokrasi deliberative yang diinterpretasi konsep partisipasi politik, ruang publik dan civil society. Metode penelitian adalah kualitatif dengan tipe grounded theory. Kehadiran Dialog Sobo Pendopo yang meningkatkan perkembangan derajat demokrasi lokal, peneliti meyakini ruang publik tersebut dapat bertransformasi menjadi badan publik, dimana kelembagaan legitimasi politik kewargaan benar-benar menjadi basis utama dalam memperkuat peranan civil society.

Kata Kunci: Dialog Sobo Pendopo, Demokrasi, Deliberasi dan Kabupaten Bojonegoro

Pendahuluan

Sebagian besar narasi mengenai Kabupaten Bojogoro adalah daerah yang bergelut dengan persoalan sosial-ekonomi yang kompleks. Bahkan CLM Penders dalam bukunya *Endemic Poverty Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*¹ menjelaskan bagaimana persoalan kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia dan mal-administrasi birokrasi di wilayah yang sebagian besar adalah demografis sosial pedesaan ini, telah berjalan sejak era kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa.

Selama ratusan tahun akhirnya momen revolutif lahir dari kemenangan Kang Yoto dan Kang Hartono di dalam pemilukada 2008 yang mengambil langkah politik keterbukaan melalui “Dialog

1 CLM Panders dalam bukunya *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Dalam versi Indonesia yang diterjemahkan secara pribadi oleh Albard Khan, buku itu berjudul *Bojonegoro 1900-1942 Kisah Kemiskinan Endemik Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*

Sobo Pendopo". Berangkat dari sosio-historis persoalan kemiskinan, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk yang demikian, serta dorongan demokratisasi lokal sejak tahun 2001, kebijakan politik keterbukaan yang diawali dengan kegiatan dialog publik diharapkan menjadi kanal pemecah apatisme warga serta persoalan kompleks lainnya untuk menjadi ruang publik yang sinergis.

Pendopo Malowopati dijadikan sebagai dialog publik yang akan diselenggarakan setiap Jumat siang diharapkan sebagai upaya desakralisasi pendopo untuk menjadi ruang publik yang mampu menjembatani kepentingan seluruh elemen warga Bojonegoro. Inilah model deliberasi yang mewacanakan keberadaan sebuah ruang publik yang setara dan demokratis. Secara makro, proses perumusan sampai evaluasi kebijakan pemerintahan Kang Yoto didedah secara kritis dan dialogis.

Dialog Sobo Pendopo sebagai simbol praktek keterbukaan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang secara konsisten dan mendiseminasi praktik keterbukaan di sektor lain rupanya menarik perhatian *Organisation for Economic Cooperation of Development* (OECD) yang sedang menyusun dampak pelaksanaan *open government*, baik di pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas RI. Dialog Sobo Pendopo adalah bagian terpenting dari keterpilihan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah percontohan pemerintahan terbuka (*Sub-national Government Pilot Program of Open Government Partnership*) pada 8 April 2016.²

Terpilihnya Bojonegoro sebagai pemerintahan daerah terbuka percontohan dunia, menjadikan Bojonegoro diundang di berbagai forum tingkat internasional, sekaligus Kang Yoto menjadi *keynote speaker*. Antara lain terundang pada kegiatan³:

1. *Open Government Partnership Asia Pasific Regional Dialogue*, tanggal 21-22 Juli 2016 di Manila
2. *Sub-national Pioneers' tier Meeting*, tanggal 15-16 September 2016 di Washington DC
3. *Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex*, Brighton-UK tanggal 5 Desember 2016
4. *Open Government Partnership Global Summit*, tanggal 7-9 Desember di Paris.

2 Setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga OGP, berdasarkan email dari Kitty Tim OGP tanggal 8 April 2016, menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu *pilot project* keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia (*Hasil wawancara dengan Diskominfo pada tanggal 17 Mei 2016*)

3 Diskominfo. 2016. *Menuju Gerbang Dunia, Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia*. pdf.

Berangkat dari fenomena menarik di atas, naskah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe *grounded theory* yang dilaksanakan pada episode semester pertama tahun 2017. Demokrasi deliberasi menjadi basis teori yang dieksplorasi sesuai konteks Dialog Sobo Pendopo. Genealogi deliberasi seperti partisipasi politik, ruang terbuka dan *civil society* menjadi instrumen konseptual untuk menganalisa secara mendalam praktik-praktik Dialog Sobo Pendopo.

Dialog Sobo Pendopo

Secara fundamental ada dua momen untuk menjelaskan gejala revolusi politik keterbukaan di Kabupaten Bojonegoro. Era reformasi yang melahirkan politik demokrasi tahun 1998 dan kebijakan politik desentralisasi tahun 2001 yang diantaranya agenda pemilukada langsung tahun 2005. Esensinya adalah masyarakat sebagai bagian dari entitas *civil society* memiliki hak dasar, kebebasan dan persamaan kedudukan yang tidak bisa diintervensi secara otoriter oleh pemerintah. Di dalam lokus kebijakan dan manajemen pemerintahan, masyarakat menjadi objek sekaligus subjek kebijakan, sehingga menjustifikasi kepada pemerintahan untuk segera berbenah, salah satunya dalam pelayanan publik dengan inovasi model *bottom up* dan partisipatoris.

Atas dasar perubahan politik yang mendasar dan cepat, model pelayanan demokratis seperti Dialog Sobo Pendopo menyebabkan kegamangan (*culture shock*) di internal birokrasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Pemerintahan model birokratik (*bureaucratic polity*) yang telah berjalan sejak era kolonialisme dan secara massif di era orde baru menciptakan sindrom birokrasi kompleks.

Setidaknya dua domain yang mengalami *culture shock*, yaitu birokrat dan sebagian besar warga Bojonegoro. Paradigma birokrat yang dilayani oleh warga, selalu beraktivitas di dalam gedung pemerintahan yang megah serta struktur eksekutor kebijakan yang kompleks menciptakan relasi patronase. Di sisi lain, proses politik keterbukaan yang berjalan cepat menimbulkan kegagalan komunikasi politik warga, yang sebagian besar tinggal di kontur sosial pedesaan. Setidaknya hal tersebut membutuhkan adaptasi selama dua-tiga tahun paska berjalannya dialog publik.⁴

Di sebuah kesempatan, Kang Yoto menjelaskan bahwa Dialog Sobo Pendopo merupakan salah satu metode yang paling berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus materi untuk mengambil

4 Hasil wawancara dengan Bp. Maspriadi, Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada 4 April 2017.

keputusan⁵. Secara sederhana, siapa pun warga Bojonegoro boleh bertanya, menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, dan masukan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebaliknya, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait langsung menyampaikan tanggapan dan jawaban terkait pertanyaan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Dialog Sobo Pendopo ini dirasa efektif untuk memahami perasaan dan pikiran masyarakat Bojonegoro sehingga dialog ini dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Kang Yoto dan Setyo Hartono (2013-2018).

Salah satu pengamatan peneliti di kegiatan Dialog Sobo Pendopo yaitu pada tanggal 24 Maret 2017 di Pendopo Malowopati yang dihadiri sekitar 57 warga. Meskipun di setiap dialog menghadirkan tema-tema tertentu, perbincangan bisa secara umum menyangkut persoalan warga. Beberapa warga menyampaikan persoalan setelah pemberian informasi dari narasumber. Nasir, warga Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, menyampaikan soal pengelolaan Alun-Alun Bojonegoro. Menurutnya, Alun-Alun Bojonegoro saat ini memang tertata dengan bersih, nyaman, dan rapi. Akan tetapi, Alun-Alun Bojonegoro seolah bukan lagi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat karena pada jam-jam tertentu pintu masuk Alun-Alun Bojonegoro dikunci.

“Baru di Bojonegoro ada alun-alun yang dikunci pintu masuknya. Jadi, alun-alun terlihat seperti hanya boleh dilihat tetapi tak boleh dimasuki,” keluhnya⁶

Selanjutnya, Kusnan, warga Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, maju ke depan dan menyampaikan pertanyaan soal pemberian dana bantuan bagi anak sekolah dari keluarga miskin. Sebab, kata dia, banyak anak di desanya yang masih sekolah dan dari keluarga miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan biaya sekolah itu.

“Ada anak sekolah di kampung saya itu yang kondisi keluarganya tidak mampu. Tetapi, dia sama sekali tidak mendapatkan bantuan biaya sekolah. Sementara, ada anak lain dari keluarga mampu tetapi malah mendapatkan bantuan,” ujarnya⁷.

Kegiatan Sobo Pendopo tidak hanya soal kritik terhadap pemerintah, namun juga sarana komunikasi yang mengapresiasi kinerja pemerintahan. Misalnya, Sanawi, dari perkumpulan disabilitas Kabupaten Bojonegoro. Ia di hadapan peserta Dialog Sobo Pendopo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati

5 Hasil Wawancara dengan Kang Yoto pada 31 Mei 2017

6 Hasil Pengamatan Dialog Bpk. Nasir, warga Desa Bangilan, Kecamatan Kapas.

7 Hasil Pengamatan Dialog Bpk. Kusnan, warga Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu.

Bojonegoro, Kang Yoto dan Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, karena selama ini mendapatkan perhatian dan bimbingan. Sehingga, orang-orang yang menderita kecacatan atau disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan tetap berprestasi di tengah masyarakat.⁸

Hingga waktu yang disediakan oleh panitia, tercatat ada 10 pertanyaan, pendapat, dan apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pertanyaan dan pendapat itu secara cermat ditulis dan dipelajari oleh Kang Yoto. Namun, sebelumnya masing-masing pertanyaan dan pendapat itu dijawab oleh bagian, badan, atau dinas terkait. Setelah itu, Kang Yoto, menanggapi setiap pertanyaan dan pendapat yang diadukan oleh masyarakat yang hadir dalam Dialog Sobo Pendopo tersebut. Menanggapi sejumlah pertanyaan itu, Kang Yoto, menyampaikan bahwa pemerintah itu mengambil keputusan berdasarkan manfaat bagi orang banyak, bukan dari yang sedikit.

"Nah, yang sedikit itu tetap diakomodasi tetapi ya ruangnya beda," ujarnya.⁹

Kang Yoto dalam kesempatan itu juga menyampaikan capaian yang telah diraih oleh Bojonegoro selama kepemimpinannya yaitu ketahanan pangan dengan menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan, ketahanan energi yaitu Bojonegoro sebagai lumbung energi bagi negeri di mana produksi minyak mentah nasional saat ini sekitar 20 persen dipasok oleh Bojonegoro. Selain itu, kata Kang Yoto, Bojonegoro juga meraih prestasi sebagai daerah yang menerapkan *open government*, daerah yang sanggup menghadapi bencana dan berhasil meraih penghargaan tingkat nasional, prestasi di bidang teknologi, daerah yang ramah terhadap hak asasi manusia, berhasil melakukan revolusi mental sejak 2008, dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.

"Capaian itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa keterlibatan penuh dari masyarakat Bojonegoro," ujar Kang Yoto.¹⁰

Di dalam kesempatan bertemu dengan Kang Yoto, pencapaian yang diperoleh Bojonegoro selama ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan membangun Bojonegoro ini adalah partisipasi masyarakat melalui Dialog Sobo Pendopo yang telah berlangsung sejak 2008 hingga

8 Hasil Pengamatan Dialog Bpk. Sanawi

9 Hasil Pengamatan Jawaban Kang Yoto dalam Dialog Sobo Pendopo

10 Wawancara dengan Kang Yoto setelah acara Dialog Sobo Pendopo 24 Maret 2017

kini. Pada awalnya, kata Kang Yoto, dalam Dialog Sobo Pendopo itu dijadikan oleh masyarakat untuk mengadukan banyak hal dan cenderung emosional dan marah-marah. Kemudian, seiring dengan proses yang terus berjalan Dialog Sobo Pendopo itu dijadikan sebagai ajang debat, adu argumen.

Menurutnya, gagasan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dalam Dialog Sobo Pendopo ini menjadi landasan atau dasar bagi Pemkab Bojonegoro untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan juga mengambil keputusan yang tepat.

Menanggapi keberlanjutan Dialog Sobo Pendopo dan momentum pemilukada Bojonegoro 2018 yang tidak memungkinkan Kang Yoto untuk maju kembali, beliau menjelaskan bahwa segala kebijakan yang menyangkut model pemerintahan terbuka nantinya akan dibentuk peraturan daerah¹¹. Hal ini juga sempat peneliti konfirmasi ke pejabat di lingkungan Diskominfo dan legislator di DPRD, memperoleh jawaban yang secara substansi sama.

"Dialog Sobo Pendopo ini harus tetap dilanjutkan meski saya tidak lagi menjabat sebagai bupati. Dialog Sobo Pendopo ini adalah model komunikasi dan interaksi berkualitas antara masyarakat dengan pihak Pemkab Bojonegoro," ujarnya¹²

Berikut beberapa dokumentasi Dialog Sobo Pendopo di tahun 2013-2016 yang dikelola oleh Diskominfo Kab. Bojonegoro¹³;

1. Pada edisi Dialog Sobo Pendopo Jumat, 22 Februari 2013 misalnya Mahmudi Mulyono, warga Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan tentang tes ujian bagi perangkat desa dan bagaimana transparansinya. Ia meminta pihak BPMD mengevaluasi tes ujian perangkat desa yang sudah berjalan selama ini. Ia juga mempertanyakan kapan agenda tes perangkat desa itu dilaksanakan. Pertanyaan itu ditanggapi dan dijawab langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.
2. Pada edisi Dialog Sobo Pendopo Jumat, 23 Mei 2013, Heri Dwi, warga Gang Makam Sedeng, Kota Bojonegoro, mempertanyakan soal pelebaran jalan Panglima Sudirman, Kota Bojonegoro. Ia bekerja sebagai pedagang kaki lima dan

11 Perbup No 33 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro. Perbup No 30 tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Perbup No 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Perbup No 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

12 Wawancara Kang Yoto setelah acara Dialog Sobo Pendopo 24 Maret 2017

13 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro. *Op Cit.*

mengaku tidak setuju dengan pelebaran jalan itu. Ia meminta Bupati Bojonegoro memperhatikan nasib pedagang kaki lima. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dan dijawab oleh Bupati Bojonegoro. Kemudian, pada edisi yang sama Suwarno, warga Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu, menanyakan terkait ditinggikannya tanggul Sungai Bengawan Solo. Ia mengeluhkan proyek itu membuat dirinya kesulitan mengambil bahan batu bata. Ia berharap pihak dinas terkait memperhatikan perajin batu bata. Pertanyaan itu langsung ditanggapi Dinas Pekerjaan Umum dan Bupati Bojonegoro.

3. Pada edisi Dialog Sobo Pendopo Jumat, 14 Juni 2013, Nur Sukiswo, warga Kedungadem, bertanya soal pembangunan jalan poros kecamatan dan juga mohon ditindaklanjuti saluran pipa PDAM di Jalan Patimura yang bocor. Pertanyaan itu dijawab oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bupati Bojonegoro. Pada edisi yang sama Aji Setiawan, Kange Yune Bojonegoro, bertanya soal kebijakan bupati mengelola migas di Bojonegoro. Kemudian, ia bertanya bagaimana cara Pemkab Bojonegoro merenovasi tempat wisata agar dikelola lebih menarik, indah, dan bisa menarik wisatawan. Pertanyaan itu ditanggapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bupati Bojonegoro.
4. Dialog Sobo Pendopo edisi Jumat, 22 Agustus 2014, Dampri, warga Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, menanyakan soal pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Bojonegoro. Selain itu, ia juga bertanya soal pembangunan Waduk Gongseng dan potensi waduk Pacal agar dikelola sebagai potensi wisata. Pertanyaan itu ditanggapi langsung oleh dinas terkait dan Bupati Bojonegoro. Bupati Bojonegoro menyampaikan, terkait pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Bojonegoro menjadi kebutuhan untuk melayani kesehatan masyarakat di daerah selatan itu. Terkait lahan yang masih dicari. Soal pembangunan Waduk Gongseng dianggarkan Rp 400 miliar. Waduk Gongseng akan menampung air untuk persediaan pengairan pertanian di wilayah selatan dan timur Bojonegoro. Waduk Gongseng dan Waduk Pacal diarahkan menjadi potensi wisata
5. Dialog Sobo Pendopo edisi Jumat, 06 Maret 2015, Arif Sarifudin, warga Desa Jetak, Kecamatan Bojonegoro, bertanya terkait serangan hama wereng yang sulit diatasi. Ia bercocok tanam padi di Desa Sukorejo. Pertanyaan itu langsung ditanggapi

dinas terkait. Pada edisi yang sama, Mat Salim, warga Desa Cangakan, Kecamatan Kanor, mengaku merasa was was apabila sewaktu waktu terjadi luapan Bengawan Solo. Ia tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo. Ia minta Pemkab Bojonegoro membangun tanggul dan saluran air untuk membuang air ke sungai. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dinas terkait.

6. Dialog Sobo Pendopo edisi Jumat, 15 Mei 2015, Djasmani, warga Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, menyampaikan soal pembangunan embung. Di desanya sudah dibangun tiga embung dan akan dibangun satu embung lagi. Tetapi, embung itu rencananya memakai lahan makam. Dia bertanya bagaimana apa boleh membangun embung di pemakaman. Pertanyaan ini langsung ditanggapi dinas terkait.
7. Pada Dialog Sobo Pendopo edisi Jumat, 18 Maret 2016, Karsono, warga Desa/Kecamatan Kapas, minta agar jalan di sepanjang Semanding-Sambiroto agar diberi penerangan jalan umum. Pertanyaan ini ditanggapi oleh dinas terkait. Dialog Sobo Pendopo ini bukan hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Namun di tingkat desa juga dilakukan interaktif antara pejabat desa dengan rakyatnya. Salah satunya Dialog Sobo Pendopo di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo.

Demokrasi Deliberatif

Diskursus deliberatif menjadi sebuah isu dialektika antara demokrasi demokrasi liberal-prosedural¹⁴ dan demokrasi substansial. Hampir seusia kemerdekaan negara Indonesia, perjalanan demokrasi di beberapa rezim politik masih berkutat pada determinasi demokrasi liberal-prosedural. Demokrasi terjebak pada praktik monoton seperti pemilukada yang hanya dimaknai secara seremonial melahirkan kepemimpinan elitis, bahkan korup. Persoalan aspirasi rakyat lebih banyak diaktualisasi dalam jargon kampanye sampai kuantifikasi kotak suara. Demokrasi hanya soal retorika pemerintahan rakyat (*demoscratos*) produk dari hitung-menghitung angka kalah dan menang dalam bilik suara. Maka, spekulasi politik menjadi dinamika demokrasi di beberapa daerah, karena warga hanya dihadapkan pada

14 Beberapa tokoh pendukung demokrasi model ini adalah Schumpeter, Dahl. Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai sistem di mana rakyat mempunyai peluang untuk menerima dan menolak pemimpin mereka dengan proses pemilu. Lihat Joseph Schumpeter. 1947. *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper and Brothers.

Robert A Dahl, 1982. *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy as Control*, Yale University Press.

proses dukung dan kritik pada momen-momen politik elektoral lima tahunan semata. Ironinya, parameter demokrasi sering bertumpu pada aspek-aspek prosedural yang demikian.

Dialog Sobo Pendopo yang digagas oleh Kang Yoto sejak tahun 2008, hadir untuk mendobrak tradisi demokrasi yang demikian, atau dalam bahasa lain, mencoba menjembatani ketegangan antara kedua isu dialektika di atas. Meskipun lahir dari rahim demokrasi liberal, peneliti optimis bahwa perjalanan konstelasi Dialog Sobo Pendopo adalah instrumen politik yang memiliki pondasi dalam mengejawantahkan demokrasi substansial yaitu deliberasi.

Term deliberasi berasal dari *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah¹⁵. Konteks deliberasi adalah sebuah kondisi politik pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah, minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut. Tradisi ini sejatinya telah tertanama secara sosio-historis di masyarakat pedesaan, yang dikenal dengan konsep demokrasi politik musyawarah (*rembug desa*). Tokoh-tokoh bangsa mengusulkan praktik-praktik tersebut ke dalam manuskrip politik hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Hansen menyatakan bahwa bahwa diskusi politik dan deliberasi sejatinya telah lama menjadi elemen penting dalam teori demokrasi¹⁶. Terminologi deliberasi sebagai ruang dialektika publik yang berkorelasi dengan derajat demokrasi dapat dilacak dari kerangka berpikir filsafat klasik Yunani seperti Ephialtes¹⁷ dan Perikles¹⁸. Di zaman abad pencerahan (*Renaissance*), gagasan filsafat Yunani dikembangkan ke dalam kerangka demokrasi modern oleh pemikir Locke¹⁹ dan Rousseau²⁰ melalui kontrak sosial, gagasan *civil society*

15 F. Budi Hardiman . 2004. "*Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia PascaSoeharto?*", Yogyakarta: Majalah BASIS, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember

16 K.M, Hansen. 2004. *Deliberative Democracy and Opinion Formation*. Odense: University of Southren Denmark Press.

17 Beberapa pemikiran Ephialthes yang menjadi pijakan dasar demokrasi; a) Memasukkan orang-orang demes ke dalam suku (yang semula beranggotakan bangsawan), b) Majelis Rakyat beranggota 6000 dari semua suku. Keputusan jarang dengan voting namun melalui retorika, c) Mendirikan dewan Lima Ratus (10 suku @ 50 utusan) dan d) Tidak ada upah bagi Dewan Lima ratus, Majelis Rakyat, dan Hakim

18 Beberapa pemikiran Perikles sebagai lanjutan dari era Ephialtes; a) Mendorong warga utk berpartisipasi dalam polis melalui sebuah UU., b). Kemiskinan bukan penghalang warga mendapatkan kedudukan penting.

19 John Locke. 1823. *Two Treaties of Government*. London:Printed for Thomas Wegg. File Pdf.

20 Jean Jacques Rousseau. 1762. *Du Contract Social, Principes du Droit Politique*. Stuttgart:

oleh Tocquivelle²¹, pendidikan politik kewargaan dan partisipasi politik oleh J.S. Mill, dan pandangan John Dewey²² soal pentingnya ruang publik yang dialektik dan kritis disamping langkah-langkah demokrasi prosedural. Berangkat dari kerangka dasar teori demokrasi deliberatif di atas, maka konsekuensi-konsepsi yang memiliki korelasi dalam menginterpretasi model deliberasi Dialog Sobo Pendopo adalah partisipasi politik, ruang publik dan *civil society*.

Partisipasi Politik

Teori demokrasi liberal memandang pemilihan umum menjadi basis dan indikator derajat demokrasi. Partisipasi politik, bagian dari variabel penting demokrasi, senantiasa disematkan sebagai indikator pemilu. Salah seorang pendukung demokrasi liberal, Dahl memandang pemilu untuk memilih pemimpin dan perwakilan politik yang diselenggarakan reguler, kompetitif dan jujur adalah pilar demokrasi²³. Sirkulasi elit dan kekuasaan ini secara lebih khusus di dedah oleh Mosca, Pareto, Michels dan C.W. Mills. Persoalannya, mereka pun berpikir jika substansi demokrasi hanya disandarkan pada kompetisi elit maka demokrasi akan mengalami defisit.²⁴ Hipotesisnya, partisipasi politik yang hanya bergerak di domain pemilu, sebagai kontestasi elit, akan dianggap tuntas paska seremonial tersebut usai.

Di dalam meningkatkan partisipasi warga. menarik untuk menyimak analisa dari Zittel dan Fuchs melalui pendekatan *Integrative Democratization*²⁵. Pertama, korelasi modal sosial pendidikan dan ekonomi dengan peningkatan partisipasi warga. Bagi warga yang berpendidikan tinggi dan kemampuan ekonomi yang matang memiliki preferensi politik yang baik. Maka, tugas pemerintah adalah soal peningkatan pendidikan dan ekonomi warga. Kedua, melaksanakan reformasi institusional. Praktiknya adalah keberadaan manajemen birokrasi yang terbuka, dialog publik dan pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi dalam rekayasa partisipasi (*participatory engineering*).

Philipp Reclam.

21 Alexis de Tocquivelle. 1970. *Tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

22 John Dewey. 1997. *Democracy and Education*. File Pdf.

23 Roberth Dahl. *Op Cit*.

24 Best, H dan Higley, J. 2010. *Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspective*. Leiden: BRILL.

25 Zittel, T., & Fuchs, D. 2007. *Participatory Democracy and Political Participation: Can Participatory Engineering Bring Citizens Back in?*. London: Routledge.

Poin pertama terbantahkan di dalam riset ini. Sebagian besar partisi Dialog Sobo Pendopo adalah warga Bojonegoro yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan, yang secara Indeks Pembangunan Manusia masih berada di peringkat 26 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur²⁶. Hal ini sekaligus antitesis terhadap narasi demokrasi Marx, sebagai salah satu aktor yang mengatakan bahwa demokrasi tanpa modal ekonomi yang solid hanya terjebak pada demokrasi elitis atau demokrasi prosedural. Sedangkan poin kedua, ada korelasi yang positif, dimana Dialog Sobo Pendopo menjadi lokomotif reformasi institusional yang secara linear membawa konsekuensi keterbukaan informasi publik di instansi-instansi pemerintahan melalui media konvensional maupun digital-virtual.

Esensi partisipasi politik adalah interaksi politik warga terhadap sistem politik yang berkembang. Era postmodern, situasi politik yang dinamis membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan politik secara bersama. Prinsipnya, sistem politik demokrasi harus mengoptimalkan kuantitas dan intensitas partisipasi semua elemen masyarakat dan mendiseminasi segala lini kehidupan sosial dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Maka, legitimasi politik di dalam setiap kebijakan akan terbangun dalam domain pendukung maupun oposisi. Beberapa teoritisasi partisipasi politik seperti Verba²⁷, Huntington maupun Nelson²⁸ menjelaskan esensi dari tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintah, terlepas dari tipe maupun mekanismenya.

Dialog Sobo Pendopo yang menjadi inisiasi politik pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, adalah mekanisme partisipasi politik yang dikelola secara prosedural, sebagai kanal menumbuhkembangkan partisipasi politik warga yang telah lama terbungkam rezim politik sebelumnya. Proses penerimaan aspirasi warga secara terbuka dan bebas ini sebagai pendulum perumusan kebijakan dan medium evaluasi kebijakan yang telah berjalan. Keberhasilan kegiatan ini melahirkan dua modal politik bagi pemerintah, yaitu kepercayaan publik dan legitimasi politik. Sisi lain, manifestasi ruang publik yang mampu mempengaruhi kebijakan politik dalam hal dukungan dan kritik, sehingga persoalan yang riil di lapangan sosial benar-benar menjadi konsentrasi bersama.

26 http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/publikasi/dinamis_1_2017.pdf. Diakses pada tanggal 15 November 2017.

27 Brady, H.E., Sidney Verba, S., & Schlozman, K.L. 1995. Beyond SES: Resource Model of Political Participation, on *The American Political Science Review*, Vol. 89, No.2 (Jun., 1995)

28 Samuel P. Huntington, & Nelson, J. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ruang Publik

Ruang publik menjadi salah satu konsep penting dalam menjelaskan bangunan besar demokrasi deliberasi. Hanna Arendt menjelaskan secara sederhana bahwa ruang publik adalah ruang kebebasan dan kesetaraan politik. Terbangun melalui tindakan warga negara dalam koordinasi wicara dan persuasi²⁹. Dialektika wacana menjadi sebuah keniscayaan sebagai manifestasi pertukaran ide dan gagasan antar warga untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*).

Ekspresi otentik politik adalah perbincangan antar warga yang memiliki basis dan kepentingan yang berbeda untuk setara dalam ruang publik membicarakan, merundingkan, dan memutuskan apa yang tengah menjadi persoalan dan keputusan bersama. Maka, partisipasi politik warga menjadi variabel pendukung untuk tercapainya konsensus, sekaligus sebagai apresiasi pengakuan dan eksistensi warga sebagai agen politik (*demos*) untuk pengembangan kompetensi deliberasi politik.

Rujukan teoritis selanjutnya adalah Jurgen Habermas, yang dianggap berjasa mempopulerkan sekaligus mengembangkan konsep demokrasi deliberasi. Gagasan Habermas terangkum secara jernih dalam negara hukum demokratis³⁰, ruang publik³¹, opini publik, konsep rasio komunikatif dan rasio prosedural³² dan etika diskursus.³³ Sebagai bagian dari gerbong pemikir teori kritis Mahzab Frankfurt, gagasan Habermas mendialektika gagasan Kant, Hegel, Marx Parson, Durkheim dan Webber.

Ruang publik menjadi isu dialektik Habermas dimana setiap keputusan dan konsensus harus melalui perdebatan-perdebatan publik, dimana publik harus berdiri setara dan tanpa tekanan. Perdebatan tersebut melalui proses dialektik untuk mencari sebuah konsistensi titik temu yaitu berupa opini publik. Arena proses pembentukan opini publik adalah ruang publik (*public sphere*) yang di dalam kondisi masyarakat yang memiliki derajat demokrasi mapan, demokrasi deliberasi model ini telah berlangsung secara kontinyu.

29 Hanna Arendt. 1958. *The Human Condition*. The Chicago UP:Chicago

30 Jurgen Habermas. 1998. *Between Fact & Norms*. (Reprint). (William Rehg, Translator). Cambridge: Polity Press.

31 Jurgen Habermas. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

32 Jurgen Habermas. 1974. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article* (1964) (Sarra Lenox and Frank Lennox, Translator), *On New German Critique*, No. 03 (Autumn, 1974)

33 Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communication Action, Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*. (Thomas McCarthy, Translator). Boston: Beacon Press.

Refleksi demokrasi deliberasi sebagai ruang publik politik (*political public sphere*), sebagaimana dikutip oleh Hardiman³⁴, dimaknai sebagai hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif publik dapat berlangsung. Pembentukan opini publik berangkat dari diskusi publik (*public dialogue*) sehingga menegaskan posisi sebagai pendukung atau oposisi. Di dalam korelasi budaya demokrasi dan institusionalisasi demokrasi, penyampaian opini publik harus dijamin oleh negara dengan asas keterbukaan dan kesetaraan, berujung pada terciptanya badan pelayanan publik (*public institution*). Sampai di sini, keberadaan Dialog Sobo Pendopo selama delapan tahun dengan prinsip kesetaraan dan partisipasi politik warga dalam menerjemahkan praktik tersebut, bisa diejawantahkan sebagai ruang publik lokal, dimana terbangun atmosfer diskusi warga dalam membangun opini dan posisi politik. Bila mengikuti logika selanjutnya, Dialog Sobo Pendopo bisa bertransformasi menjadi badan publik yang kepemilikan saham politiknya dikelola oleh warga, dengan catatan konsistensi terhadap praktik-praktik ruang publik dan dialog publik yang setara dan bebas dari intervensi kekuasaan. Hal ini jelas akan membedakan dengan logika badan publik yang dikelola oleh pemerintah.

Filsuf politik yang juga mendedah ruang publik adalah John Rawls. Doktor filsafat politik Universitas Cornell dan Harvard mengkaitkan ruang publik sebagai kompetensi dalam merefleksikan gagasan nalar publik (*public reason*)³⁵. Nalar publik merupakan jalan untuk mengerti nilai saling berbagi pemahaman tentang politik diantara warga negara yang bebas dan sejajar dimana tidak ada yang memaksakan konsepsinya tentang hidup yang baik. Maka derajat nalar publik beriringan dengan sosiologi dan budaya politik masyarakat setempat.

Demografis Kabupaten Bojonegoro yang berbasis pedesaan, Dialog Sobo Pendopo yang menjadi laboratorium politik deliberasi lokal lebih dihadiri oleh partisan-partisan yang berasal sebagian besar dari masyarakat pedesaan³⁶. Di awal terselenggaranya kegiatan ini, dialog lebih banyak diwarnai perdebatan yang keras di sisi warga, dan mentalitas inferior di kalangan birokrat. Seiring berjalannya waktu, selama dua tahun terakhir, dialog lebih bersifat pencarian sintesa dari persoalan-persoalan warga.

34 F. Budi, Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.

35 John Rawls. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

36 Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 419 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bojonegoro. Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bojonegoro Diakses pada 15 November 2017.

Civil Society

Bila dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten dalam praktik deliberasinya, Dialog Sobo Pendopo dapat bertransformasi politik menjadi badan publik. Di fase tersebut, keberadaan Dialog Sobo Pendopo telah menstimulan model masyarakat *civil society*. Konsep *civil society* memang tidak semudah diterjemahkan secara harfiah ke dalam diktum masyarakat sipil atau masyarakat madani. Mengingat proses perkembangan dan dialektika *civil society* telah terbangun sejak era filsafat klasik. *Civil society* suatu istilah yang digunakan untuk pertama kalinya oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan sebutan *societes civilis*. Namun sebagai sebuah konsep, *civil society* muncul dan berkembang pada masyarakat barat. Bangsa Eropa secara turun temurun sampai abad ke-18 mengartikan *civil society* identik dengan pengertian negara (*the state*) yaitu suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok lain. Sehingga istilah *koinonia politike*, *societas civilis*, *societe civile*, *buergerliche gesellschaft*, dan *civil society* digunakan secara bergantian dengan istilah *polis*, *civitas*, *etat*, *staat*, *state* dan *stato*³⁷.

Menurut Tocqueville³⁸, kekuatan politik dan *civil society* yang menjadikan demokrasi di Amerika bertahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society* maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kemampuan negara. *Civil society* dengan mengacu pendapat Tocqueville adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Civil society sebagai ruang politik merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) dimana transaksi komunikasi yang bebas dapat dilakukan oleh warga masyarakat.

Merujuk pengertian *civil society* di atas maka, wujud *civil society* terdapat pada organisasi/ asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di

37 Muhammad As Hikam. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*.. Jakarta: LP3ES. Hlm. 1

38 Alexis de Tocquivelle. 1970. *Tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

luar pengaruh negara. Misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Government Organization*-NGO), organisasi sosial dan keagamaan,, paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Keberadaan mereka diluar sistem politik namun memiliki prefrensi terhadap persoalan-persoalan politik yang kontekstual. Kontekstualisasi *civil society* di Kabupaten Bojonegoro telah berkembang sebelum adanya kegiatan Dialog Sobo Pendopo. Beberapa LSM seperti Bojonegoro Institute, Idfos, Sinergantara yang berbasis sosial-politik. HMI, GMNI, dan PMII yang berbasis gerakan kemahasiswaan, lalu organisasi nasional Muhammadiyah dan NU adalah bagian dari dinamika *civil society*. Keberadaan Dialog Sobo Pendopo semakin memberikan aktualisasi praktik-praktik pengelolaan persoalan publik secara matang dan sinergis. Signifikasi yang nyata adalah politik kewargaan individu yang lepas dari ikatan komunal menemukan momentumnya dalam aktivitas-aktivitas politik deliberasi.

Habermas menjelaskan kondisi-kondisi yang mendukung masyarakat *civil society* yaitu masyarakat yang terhimpun dalam sebuah komunitas, organisasi atau gerakan yang bersifat reflektif mengkorelasikan persoalan-persoalan kemasyarakatan di wilayah privat ke dalam ruang publik politis. Di dalam konstelasi determinasi politik global di negara-negara berkembang, dinamika wacana *civil society* dipengaruhi oleh berbagai peristiwa politik dunia yang mendesak proses demokrasi ke berbagai belahan dunia. Desakan demokratisasi dan redemokratisasi ini oleh Huntington dinilai sebagai “gelombang demokrasi ketiga”³⁹.

Penutup

Berangkat dari persoalan sosial-ekonomi yang kompleks (intern) serta dorongan demokrasi yang massif (ekstern), pemenang pemilu pada 2008, Kang Yoto dan Jang Hartono mengejawantahkan politik keterbukaan melalui Dialog Sobo Pendopo. Ini menjadi lokomotif kebijakan politik keterbukaan dengan manifestasi nilai-nilai deliberatif. Secara teori demokrasi yang membelah ke dalam paradigma demokrasi prosedural dan substantif, praktik Dialog Sobo Pendopo yang berjalan sejak tahun 2008, menjembatani dialektika demokrasi yang berbasis modal politik dan non-politik. Lepas dari itu, aspek yang penting dalam penelitian ini adalah penjelasan teori demokrasi deliberatif yang diinterpretasi melalui partisipasi politik, ruang publik dan *civil society*.

39 Samuel Huntington. 1991. *The Third Wave*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

Ketiga konsep tersebut menjadi sub-narasi demokrasi delibertasi dalam mengungkap secara mendalam praktik Dialog Sobo Pendopo.

Daftar Bacaan

- Arendt, Hanna. 1958. *The Human Condition*. The Chicago UP:Chicago
- Brady, H.E., Sidney Verba, S., & Schlozman, K.L. 1995. Beyond SES: Resource Model of Political Participation, on *The American Political Science Review*, Vol. 89, No.2 (Jun., 1995)
- Best, H dan Higley, J. 2010. *Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspective*. Leiden:BRILL.
- Dahl, Robert A.1982. *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy as Control*, Yale University Press.
- Dunn, William N.. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Edisi Kedua). (Wibawa S., dkk, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah mada University Press
- Habermas, Jurgen..1974. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article* (1964) (Sarra Lenox and Frank Lennox, Translator), On *New German Critique*, No. 03 (Autumn, 1974)
- , 1984. *The Theory of Communication Action, Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*. (Thomas McCarthy, Translator). Boston: Beacon Press.
- , 1998. *Between Fact & Norms*. (Reprint). (William Rehg, Translator). Cambridge: Polity Press.
- , 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hansen K.M. 2004. *Deliberative Democracy and Opinion Formation*. Odense: University of Southhern Denmark Press.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2004. "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia PascaSoeharto?", Yogyakarta: Majalah BASIS, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember
- Hikam, Muhammad As. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*.. Jakarta: LP3ES
- Huntington, Samuel. 1991. *The Thidr Wave*. Oklahoma:University of Oklahoma Press
- Huntington, Samuel P., & Nelson, J. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta,

- Rousseau, Jean Jacques. 1762. *Du Contract Social, Principes du Droit Politique*. Stuttgart: Philipp Reclam.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Schumpeter, Joseph. 1947. *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper and Brothers.
- Tocquerville, Alexis de. 1970. *Tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Zittel, T., & Fuchs, D. 2007. *Participatory Democracy and Political Participation: Can Participatory Engineering Bring Citizens Back in?*. London: Routledge.

Sumber Lain

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bojonegoro
- http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/publikasi/dinamis_1_2017
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2007. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur tahun 2007*. File Pdf.
- CLM Panders dalam bukunya *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Dalam versi Indonesia yang diterjemahkan secara pribadi oleh Albard Khan, buku itu berjudul *Bojonegoro 1900-1942 Kisah Kemiskinan Endemik Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*. File Pdf.
- Diskominfo. 2016. *Menuju Gerbang Dunia, Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia*. pdf.
- John Dewey. 1997. *Democracy and Education*. File Pdf.
- John Locke. 1823. *Two Treaties of Government*. London: Printed for Thomas Wegg. File Pdf.
- Perbup No 33 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro. File Pdf
- Perbup No 30 tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. File Pdf.
- Perbup No 40 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. File Pdf
- Perbup No 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. File Pdf.